BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) di Indonesia dirasakan masih belum memadai untuk dapat menanggulangi berbagai permasalahan yang terjadi dalam kegiatan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) yang semakin kompleks, karena berbeda dengan perdagangan secara tradisional, perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) melibatkan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang terus setiap harinya. Pengaturan *e-commerce* dalam hukum positif di Indonesia dirasakan belum memadai karena belum mampu memberikan perlindungan hukum secara maksimal bagi para pihak dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*).

Pertanggungjawaban para pihak dalam perdagangan yang dilakukan secara elektronik (*e-commerce*) pada hakikatnya terikat pada perjanjian yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tunduk pada asas Hukum Perdata Internasional, karena perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) bersifat global. Para pihak yang terlibat dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) juga pada pokoknya

terikat pada kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana apa yang diperjanjikan.

Penyelesaian sengketa dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) akan jauh lebih efektif jika melalui jalur penyelesaian secara non litigasi. Hal ini dikarenakan jalur penyelesaian secara non litigasi memberikan keunggulan seperti proses yang lebih cepat, serta menjaga nama baik para pihak yang bersengketa dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) karena bersifat rahasia.

B. SARAN

Penulis berdasarkan berbagai uraian di atas, menyampaikan beberapa saran untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), antara lain :

1. Perlindungan terhadap para pihak dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) di Indonesia dirasakan masih kurang karena para pihak dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) di Indonesia melibatkan banyak pihak yang sangat beragam, mulai dari penjual perorangan hingga perusahaan penyedia layanan penjualan *online* yang berskala internasional. Sudah seharusnya pemerintah membuat peraturan yang memberikan kewajiban untuk melakukan pendaftaran serta memberikan klasifikasi terhadap pelaku usaha sehingga menjaga

ketertiban dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) di Indonesia.

2. Pertanggungjawaban para pihak sebaiknya dibuat dengan suatu perjanjian baku oleh lembaga yang memahami benar perkembangan teknologi seperti misalnya polis-polis dalam asuransi demi melindungi para pihak yang terlibat dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) di Indonesia yang memang perlu kita akui bahwa kebanyakan tidak memahami perkembangan teknologi.
3. Penyelesaian sengketa dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) akan jauh lebih efektif jika melalui jalur non litigasi, dimana penulis berpandangan bahwa *choice of law* yang tepat dalam hal ini yaitu arbitrase, hal ini dikarenakan keberadaan para pihak yang terlibat dalam perdagangan secara elektronik dan hukum yang mengatur dalam kegiatan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) seringkali melibatkan peraturan yang berbeda dikarenakan keberadaan para pihak yang terkadang juga melibatkan unsur asing seperti halnya dalam perdata internasional.